WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
10. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28) ;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh (Lembaran Berita Aceh Tahun 2017 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selajutnya disebut Dinas PP, PA, Dalduk dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.
8. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh (Lembaran Berita Aceh Tahun 2017 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilaksukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pemberdayaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Pemberdayaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PP, PA, Dalduk dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.
8. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.

9. Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disebut SIGA adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
11. Forum Penyelenggara Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disebut Forum SIGA adalah wadah komunikasi SKPA di Provinsi dan wadah komunikasi SKPK di Kota untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender
12. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan

9. Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

10. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disebut SIGA adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

11. Forum Penyelenggara Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disebut Forum SIGA adalah wadah komunikasi SKPA di Provinsi dan wadah komunikasi SKPK di Kota untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender

12. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.

13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

16. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan

tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

17. Strategi Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
18. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui observasi terhadap sekumpulan objek atau individu.
19. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/ atau sudah dipublikasikan.
20. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
21. Data Anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
22. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial-budaya dan kekerasan.
23. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan P2TP2A, dan PKT di Puskesmas dan Rumah sakit, UPPA di kepolisian dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Woman Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaring forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA bagi SKPK/Instansi terkait.

tingkat akses, pertisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan ketidakpuasan kedudukan, tugas, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

17. Strategi Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

18. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui observasi terhadap sekumpulan objek atau individu.

19. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/ atau sudah dipublikasikan

20. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

21. Data Anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

22. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki disetiap bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial-budaya dan kekerasan.

23. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan P2TP2A, dan PKT di Puskesmas dan Rumah sakit. UPPA di kepolisian dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Woman Crisis Center (WCC), lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaring forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA bagi SKPK/Instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kota dalam penggunaan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
b. memperkuat dan mendorong SKPK/ Instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan sumber daya terlatih dan ketersediaan mekanisme pengumpulan data terpilah;
c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK/ Instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan SIGA;
d. meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

a. strategi dan kebijakan;
b. pengelolaan data SIGA;
c. penyelenggaraan SIGA;
d. evaluasi dan pelaporan;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pembiayaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. spesifik, yaitu data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara tanggung jawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur ilmiah;
c. dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
d. relevan, yaitu data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kota dalam penggunaan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;

b. memperkuat dan mendorong SKPK/ Instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan sumber daya terlatih dan ketersediaan mekanisme pengumpulan data terpilah;

c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK/ Instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan SIGA;

d. meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

a. strategi dan kebijakan;

b. pengelolaan data SIGA;

c. penyelenggaraan SIGA;

d. evaluasi dan pelaporan;

e. pembinaan dan pengawasan; dan

f. pembiayaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. spesifik, yaitu data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;

b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara tanggung jawab dan sesuai kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur timiah;

c. dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologi konsep definisi, klasifikasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;

d. relevan, yaitu data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas

kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. berkelanjutan, yaitu pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 6

(1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.

(2) Meningkatkan komitmen di tingkat Pemerintah Kota dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan daerah.

(3) Meningkatkan pemahaman SKPK/Instansi terkait dan masyarakat tentang SIGA di Pemerintah Kota.

(4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola data SIGA dalam memfasilitasi penyediaaan data terpilah gender di Pemerintah Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 7

(1) Penguatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi lintas SKPK/Instansi Terkait.

(2) Penguatan kelembagaan/forum data gender dan anak.

(3) Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak.

(4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak.

kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. berkelanjutan, yaitu pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 6

(1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.

(2) Meningkatkan komitmen di tingkat Pemerintah Kota dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan perempuan bak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan daerah.

(3) Meningkatkan pemahaman SKPK/Instansi terkait dan masyarakat tentang SIGA di Pemerintah Kota.

(4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola data SIGA dalam memfasilitasi penyediaan data terpilah gender di Pemerintah Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 7

(1) Pengusatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi lintas SKPK/Instansi Terkait

(2) Pengusatan kelembagaan/forum data gender dan anak.

(3) Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak.

(4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak.

BAB III

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Pengelompokan Data

Pasal 8

(1) Pengelolaan Data Terpilah dikelompokkan:
   a. data gender;
   b. data anak;
   c. data kelembagaan.

(2) Data Gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. data umum;
   b. data gender bidang ekonomi;
   c. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
   d. data perlindungan hak perempuan;
   e. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

(3) data anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan;
   e. perlindungan khusus.

(4) data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. data kelembagaan pengarusutamaan gender;
   b. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak;

(5) Pengelolaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 9

(1) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB III

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Pengelompokan Data

Pasal 8

(1) Pengelolaan Data Terpilah dikelompokkan:

a. data gender;

b. data anak;

c. data kelembagaan.

(2) Data Gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:

a. data umum;

b. data gender bidang ekonomi;

c. data gender bidang politik, sosial dan hukum;

d. data perlindungan hak perempuan;

e. data pemberdayaan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

(3) data anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. pendidikan;

e. perlindungan khusus.

(4) data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. data kelembagaan pengarusutamaan gender;

b. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak;

(5) Pengelolaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 9

(1) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Analisa

Pasal 10

(1) Pengolahan data gender dan anak dilakukan dengan mengindentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indikator yang dapat mengambarkan kesetaraan gender pada input, output, outcome dan impact di masing-masing SKPK/Instansi terkait.
(2) Indentifikasi sumber-sumber data terpilah baik dari sensus penduduk, survey, penelitian/kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, obervasi, FGD atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh SKPK/Instansi terkait.
(3) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan.
(4) Data SIGA yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah Aplikasi SIGA.

Bagian Keempat

Penyajian Data

Pasal 11

(1) Penyajian data terpilah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, infografis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
(2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya;
(3) Data SIGA yang telah diinput dalam Aplikasi SIGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dapat disajikan berupa Buku Data Gender dan Anak Kota.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pengolahan dan Analisa
Pasal 10

(1) Pengolahan data gender dan anak dilakukan dengan mengindentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indikator yang dapat mengambarkan kesetaraan gender pada input, output, outcome dan impact di masing-masing SKPK/Instansi terkait.

(2) Indentifikasi sumber-sumber data terpilah baik dari sensus penduduk, survey, penelitian/kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, observasi, PGD atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh SKPK/Instansi terkait.

(3) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan.

(4) Data SIGA yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah Aplikasi SIGA.

Bagian Keempat
Penyajian Data
Pasal 11

(1) Penyajian data terpilah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, infografis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;

(2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya;

(3) Data SIGA yang telah diinput dalam Aplikasi SIGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dapat disajikan berupa Buku Data Gender dan Anak Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Data

Pasal 12

(1) Data Terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pegganggaran responsif gender.

(2) Data Terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK/Instansi terkait;

(3) Data Terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SIGA

Pasal 13

(1) Forum SIGA Kota dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota;

(2) Forum SIGA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota.

Pasal 14

(1) Forum SIGA Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :

a. Pembina : Walikota
b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
c. Ketua : Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.
d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.
e. Anggota : Kepala SKPK/Instansi terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsingnya Forum SIGA Kota Lhokseumawe dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat tim yang terdiri dari :

a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Data

Pasal 12

(1) Data Terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender.

(2) Data Terpilah dan analisis gender digunakan untuk mengetahui sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK/Instansi terkait.

(3) Data Terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SIGA

Pasal 13

(1) Forum SIGA Kota dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota;

(2) Forum SIGA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota.

Pasal 14

(1) Forum SIGA Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :

a. Pembina : Walikota

b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe

c. Ketua : Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.

d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.

e. Anggota : Kepala SKPK/Instansi terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum SIGA Kota Lhokseumawe dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat tim yang terdiri dari :

a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.

b. Ketua : Kepala Bidang yang menangani Data pada Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe.

c. Sekretaris : Pejabat yang menangani Data dan Informasi pada Bappeda Kota Lhoseumawe.

d. Anggota : Pejabat Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dan SKPK/Instansi terkait.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

(4) Untuk membantu pelaksaan tugas forum SIGA dan tim teknis dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh kepala Dinas Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Kota Lhokseumawe

Pasal 15

Tugas Forum SIGA Kota Lhokseumawe

a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA pada SKPK terkait dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe;

d. Penyelenggaraan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka persiapan, pengumpulan dan penginputan data;

e. Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengikutsertakan Anggota Forum Penyelenggara SIGA Kota Lhokseumawe.

b. Ketua : Kepala Bidang yang menangani Data pada Dinas PP, PA, Daduk dan KB Kota Lhokseumawe.

c. Sekretaris : Pejabat yang menangani Data dan Informasi pada Bappeda Kota Lhoseumawe.

d. Anggota : Pejabat Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dan SKPK/Instansi terkait.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

(4) Untuk membantu pelaksaan tugas forum SIGA dan tim teknis dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh kepala Dinas PP, PA, Daduk dan KB Kota Lhokseumawe

Pasal 15

Tugas Forum SIGA Kota Lhokseumawe

a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelenggaraan SIGA pada SKPK terkait dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe;

d. Pengelenggaraan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka persiapan, pengumpulan dan pengolahan data;

e. Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengikutsertakan Anggota Forum Pengelenggara SIGA Kota Lhokseumawe.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya forum SIGA Kota Lhokseumawe berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe dalam hal penyediaan data.

Pasal 17

Tugas Tim Teknis adalah sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkoordinasi dengan Pokja PUG dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kota Lhokseumawe.
b. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
    1. Sebagai Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
    2. Sebagai Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPK/Instansi terkait.
c. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. Menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
    2. Menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPK/Instansi terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 18

(1) Untuk menjamin efektivitas, sinergisitas dan kesinambungan penyelenggaraan data SIGA, Forum SIGA Kota Lhokseumawe melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIGA Kota Lhokseumawe.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SIGA.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan SIGA tahun berikutnya.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya forum SIGA Kota Lhokseumawe berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe dalam hal penyediaan data.

Pasal 17

Tugas Tim Teknis adalah sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkoordinasi dengan Polda PUG dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kota Lhokseumawe.

b. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

1. Sebagai Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
2. Sebagai Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPK/Instansi terkait.

c. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

1. Menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan mempergunakan indikator dan target tertukur;
2. Mengirimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPK/Instansi terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 18

(1) Untuk menjamin efektivitas, sinergisitas dan kesinambungan penyelenggaraan data SIGA, Forum SIGA Kota Lhokseumawe melakukan pemantauan dan evalusi terhadap penyelenggaraan SIGA Kota Lhokseumawe.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SIGA.

(3) Hasil evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan SIGA tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

(1) Walikota melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA Kota Lhokseumawe kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh;
(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap enam bulan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Walikota melalui Forum SIGA Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan SIGA Kota Lhokseumawe meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan SIGA, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan SIGA merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Lhokseumawe untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

(1) Walikota melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA Kota Lhokseumawe kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh;

(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap enam bulan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Walikota melalui Forum SIGA Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan SIGA Kota Lhokseumawe meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan SIGA, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan SIGA merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Lhokseumawe untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juni 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BUKHARI

LEMBARAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 22 TAHUN 2018

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juni 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BUKHARI

LEMBARAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR ..... TAHUN 2018

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA HOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK
KOTA LHOKSEUMAWE

JENIS DATA TERPILAH

A. DATA GENDER

I. Data Umum

1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam hal ini digunakan konsep dari BPS yaitu bahwa pencacahan penduduk menggunakan konsep **"de jure"** atau konsep dimana seseorang biasanya menetap/ **bertempat tinggal"** (usual residence) dan konsep **"de facto" atau konsep dimana seseorang** berada pada saat **pencacahan ".** Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

TABEL 1.1
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		P	%	P	%	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber data : BPS/Registrasi Kependudukan

2. Jumlah Kepala Rumah Tangga

Konsep yang dipakai berdasarkan definisi BPS yaitu Rumah Tangga. Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu:

LAMPIRAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
KOTA SORONG TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK
KOTA LHOKSEUMAWE

JENIS DATA TERPILAH

A. DATA GENDER

1. Data Umum

1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam hal ini digunakan konsep dari BPS yaitu bahwa pencacahan penduduk menggunakan konsep **"de jure"** atau konsep dimana seseorang biasanya menetap/ **bertempat tinggal"** (usual residence) dan konsep **"de facto" atau konsep dimana seseorang** berada pada saat **pencacahan ".** Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana **mereka** biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal **selama** 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang meninggalkan rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

TABEL 1.1
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		P	%	P	%	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber data : BPS/Kependudukan

2. Jumlah Kepala Rumah Tangga

Konsep yang dipakai berdasarkan definisi BPS yaitu Rumah Tangga. Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik **atau sensus dan** biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makanannya dari **satu dapur.** Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota **rumah tangga** Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan **kebutuhan** sehari-harinya dikelola menjadi satu.

TABEL 1.2
JUMLAH DAN PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA				
		L	%	P	%	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : BPS/ Registrasi Kependudukan

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
   Merupakan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir, sedangkan penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhirnya.

TABEL 1.3.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR,
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur											
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun		18-50 Tahun		51 Tahun keatas		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber data : BPS/Registrasi Kependudukan

TABEL 1.3.2
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA			AKADEMI/PT			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data: Disduk Capil

TABEL 1.2
JUMLAH DAN PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA				
		L	%	P	%	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : BPS\ Registrasi Kependudukan

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Menyajikan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir, sedangkan penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhirnya.

TABEL 1.3.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR,
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur													
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun		18-50 Tahun		51 Tahun keatas		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber data : BPS\Registrasi Kependudukan

TABEL 1.3.2
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD\MI			SMP\MTs			SMA\SMK\MA			AKADEMI\PT			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data: Disduk Capil

4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa (bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (bobot 1/3) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP Rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

TABEL 1.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
MENURUT KOMPONEN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP %	HARAPAN LAMA SEKOLAH %	RATA-RATA LAMA SEKOLAH %	PENGELUARAN PERKAPITA %	I P M %
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : BPS, Kementerian PPPA RI

5. Indek Pembangunan Gender (IPG)
   Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Nilai indeks berkisar 0 – 100.

TABEL 1.5
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
MENURUT KOMPONEN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP %		HARAPAN LAMA SEKOLAH %		RATA-RATA LAMA SEKOLAH %		PENGELUARAN PERKAPITA %		IPG %	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber data : BPS, Kementerian PPPA RI

4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa (bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (bobot 1/3) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP Rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

TABEL 1.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
MENURUT KOMPONEN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP %	HARAPAN LAMA SEKOLAH %	RATA-RATA LAMA SEKOLAH %	PENGELUARAN PERKAPITA %	I P M %
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : BPS, Kementerian PPPA RI

5. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Nilai indeks berkisar 0 – 100.

TABEL 1.5
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
MENURUT KOMPONEN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP %		HARAPAN LAMA SEKOLAH %		RATA-RATA LAMA SEKOLAH %		PENGELUARAN PERKAPITA %		IPG %	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber data : BPS, Kementerian PPPA RI

6. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
   Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen diantara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Nilai indeks berkisar 0 – 100.

TABEL 1.6
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
MENURUT KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Keterlibatan Perempuan di Parlemen %	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional %	Sumbangan Pendapatan Perempuan %	IDG %
1					
2					
3					
4					
dst.					

Sumber Data : BPS/Kementerian PPPA

II. Data Gender Bidang Ekonomi

1. Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK)
   Indikator ini merupakan persentase angkatan keja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK menunjukan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.

TABEL 2.1
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD/MI		SMP/MTs		SMA/ SMK/ SMA		SARJANA/ DIPLOMA		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber data : BPS/DPMTSP dan Naker

6. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen dinantara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Nilai indeks berkisar 0 – 100.

TABEL 1.6
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
MENURUT KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Keterlibatan Perempuan di Parlemen %	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional %	Sumbangan Pendapatan Perempuan %	IDG %
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : BPS\ Kementrian PPPA

II. Data Gender Bidang Ekonomi

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK menunjukan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (berbutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.

TABEL 2.1
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ....

NO	KECAMATAN	SD\MI		SMP\MTs		SMA\ SMK\ SMA		SARJANA\ DIPLOMA		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber data : BPS\DPMTSP dan Naker

2. Jumlah Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

TABEL 2.2.1
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BPS, Bappeda

TABEL 2.2.2
JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN DAN ANGKA
KEMISKINAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin			Jumlah Angka Kemiskinan		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS, Bappeda

3. Tenaga Kerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).

TABEL 2.3
JUMLAH TENAGA KERJA MIGRAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Migran			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

2. Jumlah Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

TABEL 2.2.1
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BPS, Bappeda

TABEL 2.2.2
JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN DAN ANGKA
KEMISKINAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin			Jumlah Angka Kemiskinan		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS, Bappeda

3. Tenaga Kerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).

TABEL 2.3
JUMLAH TENAGA KERJA MIGRAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Migran			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

4. Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
   Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

TABEL 2.4
JUMLAH TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja AKAD			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

5. Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
   Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.

TABEL 2.5
JUMLAH TENAGA KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja AKAN			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

6. Jumlah Pekerja di Sektor Formal
   Yang digolongkan dengan bekerja di sektor formal dalam sakernas (menggunakan pendekatan status pekerjaan) adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan adalah berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagi buruh/karyawan/pegawai. Indikator ini berguna untuk melihat gambaran daya serap sektor formal terhadap penduduk.

TABEL 2.6
JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR FORMAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Formal			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: BPS, DPMTSP dan Naker

4. Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah pemenuhan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

TABEL 2.4
JUMLAH TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja AKAD			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

5. Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah pemenuhan tenaga kerja di luar negeri.

TABEL 2.5
JUMLAH TENAGA KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja AKAN			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

6. Jumlah Pekerja di Sektor Formal
Yang dilonggarkan dengan bekerja di sektor formal dalam sekarnas (menggunakan pendekatan status pekerjaan) adalah orang yang statusnya berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagi buruh/karyawan/pegawai. Indikator ini bergunа untuk melihat gambaran daya serap sektor formal terhadap penduduk.

TABEL 2.6
JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR FORMAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Formal			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: BPS, DPMTSP dan Naker

7. Jumlah Pekerja di Sektor Informal

Pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan non pertanian serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

TABEL 2.7
JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Informal			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: BPS, DPMTSP dan Naker

8. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UKM)
Merupakan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) individu/perorangan yang terdaftar.

TABEL 2.8
JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
MENURUT JENIS KELAMIN PEMILIK USAHA
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO			USAHA KECIL			TOTAL		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Disperindagkop

9. Keanggotaan Koperasi
Anggota koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Membayar simpanan pokok,
   b. Membayar Simpanan Wajib
   c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan/dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART
   d. Telah menandatangani buku daftar anggota

7. Jumlah Pekerja di Sektor Informal

Pekerja informal terdiri dari pendudukbekerja dengan status bertusaha sendiri, bertusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan non pertanian serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

TABEL 2.7
JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Informal			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: BPS, DPMTSP dan Naker

8. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UKM)
Merupakan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) individu/perorangan yang terdaftar.

TABEL 2.8
JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
MENURUT JENIS KELAMIN PEMILIK USAHA
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO			USAHA KECIL			TOTAL		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Disperindagkop

9. Keanggotaan Koperasi
Anggota koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Membayar simpanan pokok.
b. Membayar Simpanan Wajib
c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan/dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART
d. Telah menandatangani bukti daftar anggota

TABEL 2.9
JUMLAH KEANGGOTAAN KOPERASI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Keanggotaaan Koperasi		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: Disperindagkop

10. Jumlah Pengangguran

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima, bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TABEL 2.10
JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Pengangguran Terbuka		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BPS/DPMTSP dan Naker

11. Pekerja Tak Dibayar

Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

TABEL 2.11
JUMLAH PEKERJA TIDAK DIBAYAR
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN...

No	KECAMATAN	PekerjaTidak Dibayar		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BPS/DPMTSP dan Naker

TABEL 2.9
JUMLAH KEANGGOTAAN KOPERASI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Keanggotaaan Koperasi		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: Dispertindagkop

10. Jumlah Pengangguran
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima, bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TABEL 2.10
JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Pengangguran Terbuka		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BPS/DPMTSP dan Naker

11. Pekerja Tak Dibayar
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

TABEL 2.11
JUMLAH PEKERJA TIDAK DIBAYAR
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN...

No	KECAMATAN	PekerjaTidak Dibayar		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BPS/DPMTSP dan Naker

12. Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial
    Indikator ini menunjukkan persentase penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja sebagai tenaga profesinal atau manajerial terhadap jumlah penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja.. Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang berkerja di level manajer.

TABEL 2.12
JUMLAH DAN PERSENTASE PEKERJA PROFESIONAL
DAN MANAJERIAL DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial					
		L	P	Jumlah	L	P	%
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS, DPMTSP dan Naker.

13. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan
    a. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
       Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha/ lembaga tempat responden bekerja.
    b. Penduduk Bekerja Menurut status Pekerjaan
       Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama.
       Status Pekerjaan dikelompokkan:
       - Berusaha Sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
       - Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusah atas resiko sendiri, dan menggunakan.
       - Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
       - Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
       - Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumahtangga maupun bukan usaha rumahtangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
       - Pekerja Bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

12. Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja sebagai tenaga profesinal atau manajerial terhadap jumlah penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja. Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang berkerja di level manajer.

TABEL 2.12
JUMLAH DAN PERSENTASE PEKERJA PROFESIONAL
DAN MANAJERIAL DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial					
		L	P	Jumlah	L	P	%
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS, DPMTSP dan Naker.

13. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

a. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha/ lembaga tempat responden bekerja.

b. Penduduk Bekerja Menurut status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama.

Status Pekerjaan dikelompokkan:

- Berusaha Sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, dimaksudnya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusah atas resiko sendiri, dan menggunakan.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah sesorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
- Pekerja Bebas di pertanian adalah sesorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumahtangga maupun bukan usaha rumahtangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja Bebas di non pertanian adalah sesorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

- Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

c. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya.

Lapangan pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa). Lapangan Pekerjaan dikelompokkan:

- Lapangan Pekerjaan Jasa kemasyarakatan adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan, Negara, keamanan dan keselamatan Negara. Katagori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga professional.
- Industri Pengolahan adalah suatu unit/ kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda/barang/ produk baru yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat dengan kepada konsumen akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industry dan pekerjaan perakitan.
- Lapangan Pekerjaan Lainnya adalah lapangan usaha/kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estat, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.

TABEL 2.13.1
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Pertanian, Kehutanan, Pemburuan, dan Perikanan		JUMLAH	Pertambangan dan Penggalian		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS/DPMTSP dan Naker

- Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

c. Pendudukan Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya.

Lapangan pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa). Lapangan Pekerjaan dikelompokkan:

- Lapangan Pekerjaan Jasa kemasyarakatan adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan, Negara, keamanan dan keselamatan Negara. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga professional.
- Industri Pengolahan adalah suatu unit/ kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda/barang/ produk baru yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat dengan kepada konsumen akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industry dan pekerjaan perakitan.
- Lapangan Pekerjaan Lainnya adalah lapangan usaha/kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estat, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.

TABEL 2.13.1
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Pertanian, Kehutanan, Pemburuan, dan Perikanan		JUMLAH	Pertambangan dan Penggalian		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS/DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.2
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, STATUS PEKERJAAN
DAN JENIS PEKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Industri Pengolahan		JUMLAH	Listrik, Gas dan Air		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.3
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAANDAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Bangunan/ Konstruksi		JUMLAH	Pedagang Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.4
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, STATUS PEKERJAAN
DAN JENIS PEKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi		JUMLAH	Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.2
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, STATUS PEKERJAAN
DAN JENIS PEKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Industri Pengolahan		JUMLAH	Listrik, Gas dan Air		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.3
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAANDAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Bangunan/ Konstruksi		JUMLAH	Pedagang Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.4
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, STATUS PEKERJAAN
DAN JENIS PEKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi		JUMLAH	Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan		JUMLAH
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

TABEL 2.13.5
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, STATUS PEKERJAAN
DAN JENIS PEKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan		JUMLAH	TOTAL (Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin)		TOTAL
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

III. Data Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum

1. Partisipasi Di Lembaga Legislatif (DPA/DPRK)
   Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan indeks pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan diparlemen di antara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja profesional dan teknisi yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.
   a. Jumlah anggota DPRA dan DPRK menurut Komisi,

TABEL 3.1.1
JUMLAH ANGGOTA DPRA DI LEGISLATIF
MENURUT KOMISI DAN JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KOMISI	Anggota DPRK			KETERANGAN
		L	P	JUMLAH	
1	I				
2	II				
3	II				
4	IV				
dst	V				
TOTAL					

Sumber Data: Kesbangpol

TABEL 3.2.2
JUMLAH ANGGOTA DPRK MENURUT KOMISI
DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	ANGGOTA DPRK														
		I			II			III			dst.			TOTAL		
1		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data: Kesbangpol

TABEL 2.13.5
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, STATUS PEKERJAAN
DAN JENIS PEKERJAAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ...

NO	KECAMATAN	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan		JUMLAH	TOTAL (Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin)		TOTAL
		L	P		L	P	
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: BPS /DPMTSP dan Naker

III. Data Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum

1. Partisipasi Di Lembaga Legislatif (DPA/DPRK)

Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan indeks pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan dipariemen di antara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja profesional dan teknisi yang bertujuan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

a. Jumlah anggota DPRA dan DPRK menurut Komisi,

TABEL 3.1.1
JUMLAH ANGGOTA DPRA DI LEGISLATIF
MENURUT KOMISI DAN JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KOMISI	Anggota DPRK			KETERANGAN
		L	P	JUMLAH	
1	I				
2	II				
3	II				
4	IV				
dst	V				
	TOTAL				

Sumber Data: Kesbangpol

TABEL 3.2.2
JUMLAH ANGGOTA DPRK MENURUT KOMISI
DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	ANGGOTA DPRK																	
		I			II			III			dst.			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data: Kesbangpol

b. Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai Politik

TABEL 3.2.3
JUMLAH CALON LEGISLATIF DAN PENGURUS HARIAN
PARTAI POLITIK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Keanggotaan Partai Politik			Pengurus Harian Partai Politik		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Kesbangpol

2. Partisipasi Di Lembaga Yudikatif (Jaksa, Hakim, Polisi)
   a. Jumlah Jaksa dan Jaksa Menurut Jabatan
      Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undanguntuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkanundang-undang.

TABEL 3.2.1
JUMLAH JAKSA MENURUT JABATAN JAKSA
DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN . . .

NO	KECAMATAN	STRUKTURAL			FUNGSIONAL			TOTAL		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Kanwilkemenkumham

b. Jumlah Hakim dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

TABEL 3.3.2
JUMLAH HAKIM DAN PEJABAT MENURUT JENIS JABATAN HAKIM
DAN JENIS KELAMIN DI PENGADILAN TINGGI
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN....

NO	KECAMATAN	HAKIM			PEJABAT PENGADILAN			PEJABAT PENGADILAN AGAMA		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Kanwil kemenkumham

b. Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai Politik

TABEL 3.2.3
JUMLAH CALON LEGISLATIF DAN PENGURUS HARIAN
PARTAI POLITIK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Keanggotaan Partai Politik			Pengurus Harian Partai Politik		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Kesbangpol

2. Partisipasi Di Lembaga Yudikatif (Jaksa, Hakim, Polisi)
   a. Jumlah Jaksa dan Jaksa Menurut Jabatan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undangnuntuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkanundang-undang.

TABEL 3.2.1
JUMLAH JAKSA MENURUT JABATAN JAKSA
DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN . . .

NO	KECAMATAN	STRUKTURAL			FUNGSIONAL			TOTAL		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Kamwil/kemenkumham

b. Jumlah Hakim dan Pelabat Menurut Jenis Jabatan Hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

TABEL 3.3.2
JUMLAH HAKIM DAN PELABAT MENURUT JENIS JABATAN HAKIM
DAN JENIS KELAMIN DI PENGADILAN TINGGI
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN....

NO	KECAMATAN	HAKIM			PELABAT PENGADILAN			PELABAT PENGADILAN AGAMA		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Kanwil kemenkumham

c. Jumlah Polisi dan Pejabat di Kepolisian

TABEL 3.2.3
JUMLAH POLISI DAN PEJABAT DI KEPOLISIAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KOTA/ KECAMATAN	POLISI			KAPOLRES			WAKAPOLRES			KAPOLSEK		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data: Kanwil kemenkumham

3. Partisipasi Di Lembaga Eksekutif (PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsiaonal, PNS Menurut Pangkat dan Golongan, Camat, Bupati). Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintah yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Provinsi dan KECAMATAN, Camat, dan Kepala Desa.
   a. Jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota

TABEL 3.3.1.
JUMLAH CAMAT MENURUT JENIS KELAMIN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

No	KECAMATAN	Jumlah Camat			Jumlah Sekcam		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Kantor Camat

Tabel 3.3.2
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO.	KECAMATAN	Gol. I			Gol. II			Gol. III			Gol. IV			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data: BKPP

b. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon
   Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I s/d V di dalam pemerintahan Provinsi dan KECAMATAN antara laki-laki dan perempuan.

c. Jumlah Polisi dan Pejabat di Kepolisian

TABEL 3.2.3
JUMLAH POLISI DAN PEJABAT DI KEPOLISIAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN....

NO	KOTA/ KECAMATAN	POLISI			KAPOLRES			WAKAPOLRES			KAPOLSEK		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data: Kanwil Kemenkumham

3. Partisipasi Di Lembaga Eksekutif (PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional, PNS Menurut Pangkat dan Golongan, Cairan, Bupati). Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, sebetapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintah yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Provinsi dan KECAMATAN, Camat, dan Kepala Desa.
a. Jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota

TABEL 3.3.1.
JUMLAH CAMAT MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN...

No	KECAMATAN	Jumlah Camat			Jumlah Sekcam		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Kantor Camat

Tabel 3.3.2
JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN....

NO	KECAMATAN	Gol. I			Gol. II			Gol. III			Gol. IV			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data: BKPP

b. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon
Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I s/d V di dalam pemerintahan Provinsi dan KECAMATAN antara laki-laki dan perempuan.

TABEL 3.3.2
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN ESELON
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Eselon. I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data: BKPP

c. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Untuk mencapai obyektivitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, perlu komitmen BAPERJAKAT bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

TABEL 3.3.3
TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)		
		L	P	Jumlah
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BKPP

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya (Penghuni Lembaga Permasyarakatan, Penghuni Rumah Tahanan, Penduduk Lanjut Usia, Penyandang Desabilitas, Pengungsi Akibat Bencana).

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

TABEL 3.3.2
JUMLAH PELABAT STRUKTURAL BERDASARKAN ESELON
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data: BKPP

c. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Untuk mencapai objektivitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, perlu komitmen BAPERJAKAT bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas *tuntutan keterbukaan, demokratisasi*, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

TABEL 3.3.3
TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)		
		L	P	Jumlah
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: BKPP

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya (Pengkajian Lembaga Permasyarakatan, Pengkajian Rumah Tahanan, Pendudukan Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Pengungsi Akibat Bencana).

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

TABEL 3.4.1
JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Kesbangpol, DPMG

b. Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

TABEL 3.4.2
.JUMLAH SERIKAT PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Serikat Pekerja/Serikat Buruh			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
Dst					

Sumber Data: DPMTSP dan Naker

c. Jumlah Guru dan Dosen Menurut Jenjang Pendidikan

TABEL 3.4.3
JUMLAH GURU DAN DOSEN NEGERI/SWASTA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	GURU TK/RA			GURU SD/MI			GURU SMP/MTs			GURU SMA/SMK / SMA			DOSEN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL 3.4.1
JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Kesbangpol, DPMG

b. Seriket Pekerja/Seriket Buruh

Seriket Pekerja/Seriket Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

TABEL 3.4.2
JUMLAH SERIKAT PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Seriket Pekerja/Seriket Buruh			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
Dst					

Sumber Data:-DPMTSP dan Naker

c. Jumlah Guru dan Dosen Menurut Jenjang Pendidikan

TABEL 3.4.3
JUMLAH GURU DAN DOSEN NEGERI/SWASTA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	GURU TK/RA			GURU SD/MI			GURU SMP/MTs			GURU SMA/SMK / SMA			DOSEN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi

TABEL 3.4.4
JUMLAH GURU YANG MENDAPAT SERTIFIKASI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	GURU SD/MI			GURU SMP/MTs			GURU SMA/ SMK/MA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst.										

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Jumlah Peserta Paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional

TABEL 3.4.5
JUMLAH PESERTA KEJAR PAKET A, B, DAN C
SERTA KEAKSARAAN FUNGSIONAL
MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PAKET A			PAKET B			PAKET C			KEAKSARAAN FUNGSIONAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst.													

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

f. Jumlah Kelulusan Paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional

TABEL 3.4.6
JUMLAH KELULUSAN PAKET A, B, DAN C
SERTA KEAKSARAAN FUNGSIONAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PAKET A			PAKET B			PAKET C			KEAKSARAAN FUNGSIONAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi

TABEL 3.4.4
JUMLAH GURU YANG MENDAPAT SERTIFIKASI MENURUT JENIS
KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	GURU SD/MI			GURU SMP/MTs			GURU SMA/ SMK/MA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst.										

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Jumlah Peserta Paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional

TABEL 3.4.5
JUMLAH PESERTA KEJAR PAKET A, B, DAN C
SERTA KEAKSARAAN FUNGSIONAL
MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PAKET A			PAKET B			PAKET C			KEAKSARAAN FUNGSIONAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst.													

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

f. Jumlah Kelulusan Paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional

TABEL 3.4.6
JUMLAH KELULUSAN PAKET A, B, DAN C
SERTA KEAKSARAAN FUNGSIONAL MENURUT JENIS
KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PAKET A			PAKET B			PAKET C			KEAKSARAAN FUNGSIONAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

g. Jumlah Guru danTenaga Kependidikan (GTK) serta Dosen Penerima Beasiswa

TABEL 3.4.7
JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) SERTA DOSEN YANG MEMPEROLEH BEASISWA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KABUPATEN/ KOTA	GTK TK/RA			GTK SD/MI			GTK SMP/MTs			GTK SMA/SMK/MA			DOSEN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst.																

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IV. Data Perlindungan Hak Perenpuan

1. Kekerasan Terhadap Perempuan
   Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikolongis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

   a. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur.

TABEL 4.1.1.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	KELOMPOKUMUR				TOTAL	
		0– 18Thn (Anak)		>18Thn			
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: P2TP2A

g. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta Dosen Perguruan Tinggi

TABEL 3.4.7
JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) SERTA DOSEN YANG MEMPEROLEH BEASISWA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KABUPATEN/ KOTA	GTK TK/RA			GTK SD/MI			GTK SMP/MTs			GTK SMA/SMK/MA			DOSEN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IV. Data Perlindungan Hak Perempuan

1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

a. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur

TABEL 4.1.1.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	KELOMPOKUMUR				TOTAL	
		0– 18Thn (Anak)		>18Thn			
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: P2TP2A

b. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan.

TABEL 4.1.2
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/SedeRajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst.																			

Sumber Data: P2TP2A

c. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pekerjaan.

TABEL 4.1.3.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Bekerja			Tidak Bekerja			Total		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst.										

Sumber Data: P2TP2A

d. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan

TABEL 4.1.4.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT STATUS PERKAWINAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber data: P2TP2A

b. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan.

TABEL 4.1.2
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Tidak/Belum sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst.																			

Sumber Data: P2TP2A

c. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pekerjaan

TABEL 4.1.3.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Bekerja			Tidak Bekerja			Total		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst.										

Sumber Data: P2TP2A

d. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan

TABEL 4.1.4.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT STATUS PERKAWINAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber data: P2TP2A

e. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan

TABEL 4.1.5.
JUMLAH KORBANKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KEKERASAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	JenisKekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber data:P2TP2A

f. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian

TABEL 4.1.6.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TEMPAT KEJADIAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	TempatKejadian		
		Rumah Tangga	TempatKerja	Lainnya
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: P2TP2A

g. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan

TABEL 4.1.7.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS LAYANAN
YANG DIBERIKAN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jenis layananyang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan dan Reintegrasi
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data: P2TP2A

e. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan

TABEL 4.1.5.
JUMLAH KORBANKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KEKERASAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	JenisKekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber data:PZTPZA

f. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian

TABEL 4.1.6.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TEMPAT KEJADIAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	TempatKejadian		
		Rumah Tangga	TempatKerja	Lainnya
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data: PZTPZA

g. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan

TABEL 4.1.7.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS LAYANAN
YANG DIBERIKAN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Jenis layananyang diberikan				
		Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Pendegakan dan Bantuan	Pemulangan dan Reintegrasi
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data: PZTPZA

h. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan.

TABEL 4.1.8.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT FREKUENSI KEKERASAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber data: P2TP2A

i. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

TABEL 4.1. 9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur									Total		
		Anak (< 18 Tahun)			Remaja (18 -< 25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data: P2TP2A

j. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

TABEL 4.1.10.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Tidak/ Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data: P2TP2A

h. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan

TABEL 4.1.8.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT FREKUENSI KEKERASAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rutukan
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber data: P2TP2A

i. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

TABEL 4.1.9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur									Total		
		Anak (< 18 Tahun)			Remaja (18 -< 25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data: P2TP2A

j. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

TABEL 4.1.10.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Tidak/ Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data: P2TP2A

k. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan

TABEL 4.1.11.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO.	KECAMATAN	Bekerja			Tidak Bekerja			Total		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst.										

Sumber Data: P2TP2A

l. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban

TABEL 4.1.12.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT HUBUNGAN DENGAN KORBAN DAN
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua		Keluarga		Suami	Istri	Lainnya	
		L	P	L	P			L	P
1									
2									
3									
4									
dst									

SumberData : P2TP2A

m. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kebangsaan.

TABEL 4.1.13.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KEBANGSAAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN,...

NO	KECAMATAN	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

SumberData : P2TP2A

k. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan

TABEL 4.1.11.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO.	KECAMATAN	Bekerja			Tidak Bekerja			Total		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: PZTPZA

l. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban

TABEL 4.1.12.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT HUBUNGAN DENGAN KORBAN DAN
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Hubungan dengan Korban									
		Orang Tua		Kelurga		Suami	Isti	Lainnya	
		L	P	L	P			L	P
1									
2									
3									
4									
dst									

SumberData : PZTPZA

m. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kebangsaan.

TABEL 4.1.13.
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KEBANGSAAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

SumberData : PZTPZA

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

TABEL 4.2.1
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur									Total		
		Anak (< 18 Tahun)			Remaja (18 -< 25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe

b. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan

TABEL 4.2.2.
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tidak/ Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kota Lhokseumawe

c. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan

TABEL 4.2.3
JUMLAHKORBAN PERDAGANGANORANG
MENURUT STATUS PERKAWINANDAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN					
		Belum Kawin		Kawin		Cerai	
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

TABEL 4.2.1
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KEDUDUKAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur											
		Anak (< 18 Tahun)			Remaja (18 - < 25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)			Total		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data: Dinas Pengelolaan dan Pengawasan TPPO Kota Lhokseumawe

b. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan

TABEL 4.2.2.
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KEDUDUKAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tidak/ Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data: Dinas Pengelolaan dan Pengawasan Kota Lhokseumawe

c. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan

TABEL 4.2.3
JUMLAHKORBAN PERDAGANGANORANG
MENURUT STATUS PERKAWINANDAN JENIS KELAMIN
DAN KEDUDUKAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN					
		Belum Kawin		Kawin		Cerai	
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data: Dinas Pengelolaan dan Pengawasan TPPO Kota Lhokseumawe

d. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan yang Diberikan

TABEL 4.2.4
JUMLAH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT JENIS LAYANAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KAB/ KOTA	Penanda tangan Identifikasi	Layanan Psiko sosial	Rehabilitasi Medis	Rehabilitasi Sosial	Bantuan Hukum	Pemulangan	Reintegrasi Sosial
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe

e. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses Hukum Terhadap Pelaku

TABEL 4.2.5
JUMLAH PELAKU KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT TINGKATAN PROSES HUKUM DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	TINGKATANPROSES HUKUM						KETERANGAN
		Penyidikan		Penuntutan		Putusan Pengadilan		
		L	P	L	P	L	P	
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe

f. Amar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL 4.2.6
AMAR PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	AMAR PUTUSAN						KETERANGAN
		Pidana (Thn)		Denda (Rp.)		Restitusi (Rp.)		
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe

d. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan yang Diberikan

TABEL 4.2.4
JUMLAH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT JENIS LAYANAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KAB/ KOTA	Pemanda tangan identifika si	Layana n Psiko sosial	Rehabi litasi Medis	Rehabi litasi Sosial	Bantua n Hukum	Pemu langa n	Reinte grasi Sosial
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Lhokseumawe

e. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses Hukum Terhadap Pelaku

TABEL 4.2.5
JUMLAH PELAKU KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT TINGKATAN PROSES HUKUM DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	TINGKATAN PROSES HUKUM						KETERANGAN
		Penyidikan		Penuntutan		Putusan Pengadilan		
		L	P	L	P	L	P	
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Lhokseumawe

f. Amar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL 4.2.6
AMAR PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	AMAR PUTUSAN				KETERANGAN
		Pidana (Thn)		Denda (Rp.)	Restitusi (Rp.)	
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Lhokseumawe

g. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL 4.2.7
GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT
PEMEBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	GugusTugas		RencanaAksi Daerah PP- TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/S E)
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Jumlah
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe.

h. Jumlah Korban Bencana Dewasa, Lansia dan Manula

TABEL 4.2.8
JUMLAH PENGUNGSI DEWASA, LANSIA DAN MANULA AKIBAT KORBAN BENCANA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	DEWASA						LANSIA						MANULA			TOTAL		
		AWAL (USIA 26 - 35 TAHUN)			AKHIR (USIA 36 - 45 TAHUN)			AWAL (USIA 46 - 55 TAHUN)			AKHIR (USIA 56 - 65 TAHUN)			USIA 65 TAHUN KE ATAS					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst.																			

Sumber Data : Dinas Sosial

g. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL 4.2.7
GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT
PEMBEBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN...

NO	KECAMATAN	GugusTugas		RencanaAksi Daerah PP- TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/S E)
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Jumlah
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kota Lhokseumawe.

h. Jumlah Korban Bencana Dewasa, Lansia dan Manula

TABEL 4.2.8
JUMLAH PENGUNGSI DEWASA, LANSIA DAN MANULA AKIBAT KORBAN BENCANA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	DEWASA				LANSIA				MANULA			TOTAL		
		AWAL (USIA 26 - 35 TAHUN)		AKHIR (USIA 36 - 45 TAHUN)		AWAL (USIA 46 - 55 TAHUN)		AKHIR (USIA 56 - 65 TAHUN)		USIA 65 TAHUN KE ATAS					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst.																

Sumber Data : Dinas Sosial

i. Jumlah Warga Binaan pada Lapas Umum dan Perempuan

TABEL 4.2.9
JUMLAH WARGA BINAAN MENURUT JENIS LAPAS DAN TINGKAT PENDIDIKAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN									
		LAPAS UMUM					LAPAS PEREMPUAN				
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/SMA	PT	JLH	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/SMA	PT	JLH
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber Data : Kemenkumham

j. Jumlah Warga Binaan Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur

TABEL 4.2.10
JUMLAH WARGA BINAAN MENURUT JENIS LAPAS DAN KELOMPOK UMUR
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR													
		LAPAS UMUM							LAPAS PEREMPUAN						
		18-25 THN	26-35 THN	36-45 THN	46-55 THN	56-65 THN	66 THN KE ATAS	JLH	18-25 THN	26-35 THN	36-45 THN	46-55 THN	56-65 THN	66 THN KE ATAS	JLH
1															
2															
3															
4															
dst.															

Sumber Data : Kemenkumham

i. Jumlah Warga Binaan pada Lapas Umum dan Pertempuan

TABEL 4.2.9
JUMLAH WARGA BINAAN MENURUT JENIS LAPAS DAN TINGKAT PENDIDIKAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN									
		LAPAS UMUM					LAPAS PEREMPUAN				
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/SMA	PT	JLH	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/SMA	PT	JLH
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber Data : Kemenkumham

j. Jumlah Warga Binaan Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur

TABEL 4.2.10
JUMLAH WARGA BINAAN MENURUT JENIS LAPAS DAN KELOMPOK UMUR
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR												
		LAPAS UMUM							LAPAS PEREMPUAN					
		18-25 THN	26-35 THN	36-45 THN	46-55 THN	56-65 THN	66 THN KE ATAS	JLH	18-25 THN	26-35 THN	36-45 THN	46-55 THN	56-65 THN	66 THN KE ATAS	JLH
1															
2															
3															
4															
dst															

Sumber Data : Kemenkumham

k. Jumlah Warga Binaan Menurut Jenis Lapas dan Kasus

TABEL 4.2.11
JUMLAH WARGA BINAAN MENURUT JENIS LAPAS DAN KASUS
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KASUS													
		LAPAS UMUM							LAPAS PEREMPUAN						
		Pembunuhan	Pencurian	Pemerkosaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Lain	Pembunuhan	Pencurian	Pemerkosaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Lain
1															
2															
3															
4															
5															
dst.															

Sumber Data : Kemenkumham

V. Data Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

1. Legalitas dan Struktur Keluarga

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Pekawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundangundangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri berserta anak keturunannya.

a. Legalitas Perkawinan

Bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi penduduk yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebaliknya, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

TABEL 5.1.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
DAN KEPEMILIKAN BUKU/AKTE NIKAH KEPALA RUMAH TANGGGA
DAN PASANGANNYA YANG BERSTATUS KAWIN
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA DENGAN KRT BERSTATUS KAWIN	KEPEMILIKAN BUKU/AKTE NIKAH		
			MEMILIKI	TIDAK MEMILIKI	TOTAL
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : Kanwil Kemenag

k. Jumlah Warga Binaan Menurut Jenis Lapas dan Kasus

TABEL 4.2.1.1
JUMLAH WARGA BINAAN MENURUT JENIS LAPAS DAN KASUS
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KASUS													
		LAPAS UMUM							LAPAS PEREMPUAN						
		Pembunuhan	Pencurian	Penganiayaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Lain	Pembunuhan	Pencurian	Penganiayaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Lain
1															
2															
3															
4															
5															
dst.															

Sumber Data : Kemenkumham

V. Data Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

1. Legalitas dan Struktur Keluarga

Pencatapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundangundangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-isteri beserta anak keturunannya.

a. Legalitas Perkawinan

Bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi pendudukyang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebaliknya, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

TABEL 5.1.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
DAN KEPEMILIKAN BUKU/AKTE NIKAH KEPALA RUMAH TANGGA
DAN PASANGANNYA YANG BERSTATUS KAWIN
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA DENGAN KRT BERSTATUS KAWIN	KEPEMILIKAN BUKU/AKTE NIKAH		
			MEMILIKI	TIDAK MEMILIKI	TOTAL
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : Kanwil Kemenag

TABEL 5.1.2
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA
MENURUT SUMBER PERMOHONAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	SUMBER PERMOHONAN	
			PERMOHONAN SUAMI	GUGATAN ISTERI
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Makamah Syari'ah

b. Legalitas Kelahiran
Bukti sah mengenai status danperistiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya akte kelahiran yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yangdilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat daripemerintah.

TABEL 5.1.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ART			
			SELURUH ART	SEBAGIAN ART	TIDAK ADA	TOTAL
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : Disduk Capil

2. Ketahanan Fisik
Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Diantara ketahanan fisik dimaksud adalah Kecukupan Pangan dan Gizi yaitu kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.

TABEL 5.1.2
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA
MENURUT SUMBER PERMOHONAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	SUMBER PERMOHONAN	
			PERMOHONAN SUAMI	GUGATAN ISTERI
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Makamah Syari'ah

b. Legalitas Kelahiran

Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat daripemerintah.

TABEL 5.1.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN AKTE
KELAHIRAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ART			
			SELURUH ART	SEBAGIAN ART	TIDAK ADA	TOTAL
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : Disduk Capil

2. Ketahanan Fisik

Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi terciptanya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Diantara ketahanan fisik dimaksud adalah Kecukupan Pangan dan Gizi yaitu kondisi fisik yang tanggguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.

TABEL 5.2.1
PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI BERDASARKAN
KRITERIA BERAT BADAN MENURUT UMUR
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	STATUS GIZI BALITA			
		BURUK	KURANG	BAIK	LEBIH
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : Dinkes

3. Ketahanan Ekonomi
Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Diantara ketahanan ekonomi dimaksud adalah Tempat Tinggal Keluarga yaitu kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhisalah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk mampu membangun keluarganya dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik.

TABEL 5.3.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT STATUS
KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG
DI TEMPATI DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL		JUMLAH RUMAH TANGGA
		MILIK SENDIRI	BUKAN MILIK SENDIRI	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Dinas Pertanahan & DPKD Kota Lhokseumawe

TABEL 5.2.1
PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI BERDASARKAN
KRITERIA BERAT BADAN MENURUT UMUR
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	STATUS GIZI BALITA			
		BURUK	KURANG	BAIK	LEBIH
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : Dinkes

3. Ketahanan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga dipambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Diantara ketahanan ekonomi dimaksud adalah Tempat Tinggal Keluarga yaitu kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhisalah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk mampu membangun keluarganya dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik.

TABEL 5.3.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT STATUS
KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG
DI TEMPATI DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL		JUMLAH RUMAH TANGGA
		MILIK SENDIRI	BUKAN MILIK SENDIRI	
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Dinas Pertanahan & DPKD Kota Lhokseumawe

B. DATA ANAK

I. Hak Sipil dan Kebebasan

1. Anak dengan Akte Kelahiran

TABEL. 1.1.1
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ....

NO	KECAMATAN	Tidak Memiliki Akta Lahir			Memiliki Akta Lahir			Presentase (%)	
		L	P	JLH	L	P	JLH	Memiliki	Tdk memiliki
1									
2									
3									
4									
dst									

Sumber Data: Disduk Capil

II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan

TABEL 2.1
JUMLAH ANAK YANG DITAMPUNG DI PANTI ASUHAN
DAN JUMLAH PANTI ASUHAN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak di Panti Asuhan									Jumlah Panti Asuhan
		Yatim			Piatu			Yatim Piatu			
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber Data: Dinas Sosial

2. Penduduk Usia Perkawinan Pertama Dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun

TABEL 2.2
PENDUDUK MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA
MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	<16 TAHUN			<18 TAHUN			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Makamah Syari'ah

B. DATA ANAK

I. Hak Sipil dan Kebebasan

1. Anak dengan Akte Kelahiran

TABEL 1.1.1
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ....

NO	KECAMATAN	Tidak Memiliki Akta Lahir			Memiliki Akta Lahir			Presentase (%)	
		L	P	JLH	L	P	JLH	Memiliki	Tdk memiliki
1									
2									
3									
4									
dst									

Sumber Data: Disduk Capil

II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan

TABEL 2.1
JUMLAH ANAK YANG DITAMPUNG DI PANTI ASUHAN
DAN JUMLAH PANTI ASUHAN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak di Panti Asuhan									Jumlah Panti Asuhan
		Yatim			Piatu			Yatim Piatu			
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber Data: Dinas Sosial

2. Penduduk Usia Perkawinan Pertama Dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun

TABEL 2.2
PENDUDUK MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA
MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	< 16 TAHUN			< 18 TAHUN			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Makamah Syar'iah

III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Angka Kematian Bayi menurut jenis kelamin

TABEL 3.1
ANGKA KEMATIAN BAYI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Angka Kematian Bayi (AKB)		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

2. Angka Kematian Balita

TABEL 3.2
ANGKA KEMATIAN BALITA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Angka Kematian Balita (AKBa)		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

3. Pesentase Ibu Hamil Memperoleh Pemeriksaan Kehamilan (K1-K4)

TABEL 3.3
JUMLAH DAN PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1/K4) KE SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	K1		K4	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : Dinkes

III. Keseh**a**tan Dasar dan Kesejahteraan

1. Angka Kematian Bayi menurut Jenis Kelamin

TABEL 3.1
ANGKA KEMATIAN BAYI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Angka Kematian Bayi (AKB)		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

2. Angka Kematian Balita

TABEL 3.2
ANGKA KEMATIAN BALITA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Angka Kematian Balita (AKBa)		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

3. Persentase Ibu Hamil Memperoleh Pemeriksaan Kehamilan (K1-K4)

TABEL 3.3
JUMLAH DAN PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN IBU
HAMIL (K1/K4) KE SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	K1		K4	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data : Dinkes

4. Jumlah Bayi Memperoleh Imunisasi Dasar dan Lengkap

TABEL 3.4
JUMLAH BAYI YANG MEMPEROLEH IMUNISASI DASAR
DAN LENGKAP MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia 12-23 bln Telah Diimunisasi Lengkap		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

5. Persentase Balita Memperoleh Imunisasi Lanjutan

TABEL 3.5
JUMLAH ANAK UMUR ,1 TAHUN DI IMUNISASI CAMPAK
MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Umur <1 Tahun diimunisasikan Campak		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : Dinkes

6. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)

TABEL 3.6
JUMLAH BAYI LAHIR DENGAN BERAT BADAN RENDAH
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Bayi Lahir		Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

4. Jumlah Bayi Memperoleh Imunisasi Dasar dan Lengkap

TABEL 3.4
JUMLAH BAYI YANG MEMPEROLEH IMUNISASI DASAR
DAN LENGKAP MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia 12-23 bln Telah Diimunisasi Lengkap		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

5. Persentase Balita Memperoleh Imunisasi Lanjutan

TABEL 3.5
JUMLAH ANAK UMUR <1 TAHUN DI IMUNISASI CAMPAK
MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Umur <1 Tahun diimunisasikan Campak		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : Dinkes

6. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)

TABEL 3.6
JUMLAH BAYI LAHIR DENGAN BERAT BADAN RENDAH
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Bayi Lahir		Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

7. Jumlah Kasus Balita Dengan Kurang Gizi dan Gizi Buruk

TABEL 3.7
JUMLAH BALITA DENGAN KURANG GIZI DAN GIZI BURUK
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Balita Dengan Gizi Kurang		Balita Dengan Gizi Buruk	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

8. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif

TABEL 3.8
BAYI YANG MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF SELAMA 6 BULAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Bayi Lahir		Bayi yang Mendapatkan ASI Ekslusif selama 6 Bulan	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

IV. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 2-4 Tahun

TABEL 4.1
JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Jlh Anak Usia 0-6 Tahun	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani (F+NF)	Jumlah Belum Terlayani	Prosentase terlayani (F+NF)	Prosentase terlayani PAUD NF
			Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Jumlah Lembaga	JLH Peserta Didik				
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

7. Jumlah Kasus Balita Dengan Kurang Gizi dan Gizi Buruk

TABEL 3.7
JUMLAH BALITA DENGAN KURANG GIZI DAN GIZI BURUK
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Balita Dengan Gizi Kurang		Balita Dengan Gizi Buruk	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

8. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

TABEL 3.8
BAYI YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF SELAMA 6 BULAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Bayi Lahir		Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 Bulan	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

IV. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 2-4 Tahun

TABEL 4.1
JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Jlh Anak Usia 0-6 Tahun	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani (P+NF)	Jumlah Belum Terlayani	Prosentase terlayani (P+NF)	Prosentase PAUD NF
			Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Jumlah Lembaga	JLH Peserta Didik				
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.2
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.3
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DAN
KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	7 - 12 TAHUN			13 - 15 TAHUN			16 - 18 TAHUN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.4
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.2
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.3
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DAN
KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	7 - 12 TAHUN			13 - 15 TAHUN			16 - 18 TAHUN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.4
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

5. Angka Buta Aksara Pada Usia Sekolah (7-18) Tahun

TABEL 4.5
JUMLAH SISWA BUTA AKSARA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD SEDERAJAT		SMP SEDERAJAT		SMA SEDERAJAT	
		L	P	L	P	L	P
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Sumber Data: Dinas Pendidikan

6. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.6
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH
MENURUT JENJANGPENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	SD SEDERAJAT				SMP SEDERAJAT				SMA SEDERAJAT			
		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.													
2.													
3.													
4.													
dst													

Sumber Data : DinasPendidikan

7. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Akademik

TABEL 4.7
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SISWA SD/MI			SISWA SMP/MTs			SISWA SMA/SMK/MA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

5. Angka Buta Aksara Pada Usia Sekolah (7-18) Tahun

TABEL 4.5
JUMLAH SISWA BUTA AKSARA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD SEDERAJAT		SMP SEDERAJAT		SMA SEDERAJAT	
		L	P	L	P	L	P
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Sumber Data: Dinas Pendidikan

6. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.6
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH
MENURUT JENJANGPENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	SD SEDERAJAT				SMP SEDERAJAT				SMA SEDERAJAT			
		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.													
2.													
3.													
4.													
dst													

Sumber Data : DinasPendidikan

7. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Akademik

TABEL 4.7
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SISWA SD\MI			SISWA SMP\MTs			SISWA SMA\SMK\MA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan

8. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Seni

TABEl 4.8
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG SENI
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SISWA SD/MI			SISWA SMP/MTs			SISWA SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Disporapar

9. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Olahraga

TABEL 4.10
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SISWA SD/MI			SISWA SMP/MTs			SISWA SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Disporapar

V. Perlindungan Khusus

1. Jumlah Anak Korban Bencana

TABEL 5.1
JUMLAH PENGUNGSI ANAK DAN REMAJA AKIBAT KORBAN BENCANA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	ANAK-ANAK									REMAJA					
		BAYI (USIA 0 - 1 TAHUN)			BALITA (USIA 1 - 5 TAHUN)			KANAK-KANAK 6-11 TAHUN			AWAL (USIA 12 - 17 TAHUN)			AKHIR (USIA 18 - 25 TAHUN)		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst.																

Sumber Data : BPBD

6. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Seni

TABEL 4.8
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG SENI
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SISWA SD/MI			SISWA SMP/MTs			SISWA SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Disporapar

9. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Olahraga

TABEL 4.10
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SISWA SD/MI			SISWA SMP/MTs			SISWA SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Disporapar

V. Perlindungan Khusus

1. Jumlah Anak Korban Bencana

TABEL 5.1
JUMLAH PENGUNGSI ANAK DAN REMAJA AKIBAT KORBAN BENCANA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	ANAK-ANAK									REMAJA					
		BAYI (USIA 0 - 1 TAHUN)			BALITA (USIA 1 - 5 TAHUN)			KANAK-KANAK 6-11 TAHUN			AWAL (USIA 12 - 17 TAHUN)			AKHIR (USIA 18 - 25 TAHUN)		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst																

Sumber Data : BPBD

2. Jumlah Anak yang Berhadapan Hukum (ABH)

TABEL 5.2.1
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD/ SEDERAJAT			SMP/ SEDERAJAT			SMA/ SEDERAJAT		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : P2TP2A, Polres Lhokseumawe, Kemenkumham

Tabel 5.2.2
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT KELOMPOK UMUR
DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR 7-12 THN			KELOMPOK UMUR 13-15 THN			KELOMPOK UMUR 13-15 THN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : P2TP2A, Polres Lhokseumawe, Kemenkumham

TABEL 5.2.3
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KASUS
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KASUS							
		Pembunuhan	Pencurian	Pemerkosaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Lain	TOTAL
1									
2									
3									
4									
dst									

Sumber Data : P2TP2A, Polres Lhokseumawe, Kemenkumham

2. Jumlah Anak yang Berhadapan Hukum (ABH)

TABEL 5.2.1
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN ACEH
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	SD/ SEDERAJAT			SMP/ SEDERAJAT			SMA/ SEDERAJAT		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : P2TP2A, Polres Lhokseumawe, Kemenkumham

Tabel 5.2.2
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT KELOMPOK
UMUR
DAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR 7-12 THN			KELOMPOK UMUR 13-15 THN			KELOMPOK UMUR 13-15 THN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1										
2										
3										
4										
dst										

Sumber Data : P2TP2A, Polres Lhokseumawe, Kemenkumham

TABEL 5.2.3
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KASUS
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	KASUS							
		Pembunuhan	Pencurian	Pemerkosaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Lain	TOTAL
1									
2									
3									
4									
dst									

Sumber Data : P2TP2A, Polres Lhokseumawe, Kemenkumham

3. Jumlah Pekerja Anak

TABEL 5.3
JUMLAH PEKERJA ANAK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	PEKERJA ANAK		
		L	P	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : DPMTSP dan Naker

4. Pesentase Anak Yang Menjadi Korban Penyalah Gunaan NAPZA

TABEL 5.4
JUMLAH ANAK YANG MENGGUNAKA NAPZA
MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Anak yang menggunakan NAPZA		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber: Dinkes, BNN

5. Jumlah Anak Terinfeksi HIV dan Menderita AIDS

TABEL 5.5
JUMLAH ANAK YANG TERINVEKSI HIV DAN MENDERITA AIDS
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Terinfeksi HIV		Jumlah Anak menderita AIDs	
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

3. Jumlah Pekerja Anak

TABEL 5.3
JUMLAH PEKERJA ANAK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	PEKERJA ANAK		
		L	P	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : DPMTSP dan Naker

4. Pesentase Anak Yang Menjadi Korban Penyalah Gunaan NAPZA

TABEL 5.4
JUMLAH ANAK YANG MENGGUNAKA NAPZA
MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Anak yang menggunakan NAPZA		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber: Dinkes, BNN

5. Jumlah Anak Terinfeksi HIV dan Mendertia AIDS

TABEL 5.5
JUMLAH ANAK YANG TERINVEKSI HIV DAN MENDERITA AIDS
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Terinfeksi HIV		Jumlah Anak mendertia AIDS	
		L	P		
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinkes

6. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak

TABEL 5.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUTJENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	FISIK			PSIKIS			SEKSUAL			KDRT			PENELANTARAN			LAINNYA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst.																			

Sumber Data : P2TP2A

7. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian

TABEL 5.7
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUTTEMPAT KEJADIAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	RUMAH			SEKOLAH			RUANG PUBLIK			LAINNYA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst.													

Sumber Data : P2TP2A

8. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Layanan

TABEL 5.8
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT LAYANAN YANG DIBERIKANDAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	LAYANAN PENGADUAN			LAYANAN KESEHATAN			REHABILITASI SOSIAL			PENEGAKAN HUKUM			PENDAMPINGAN PEMULANGAN/ REINTEGRASI		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst.																

Sumber Data : P2TP2A

6. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak

TABEL 5.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUTJENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	FISIK			PSIKIS			SEKSUAL			KDRT			PENELANTARAN			LAINNYA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst.																			

Sumber Data : P2TP2A

7. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian

TABEL 5.7
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUTTEMPAT KEJADIAN DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	RUMAH			SEKOLAH			RUANG PUBLIK			LAINNYA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst.													

Sumber Data : P2TP2A

8. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Layanan

TABEL 5.8
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT LAYANAN YANG DIBERIKANDAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	LAYANAN PENGADUAN			LAYANAN KESEHATAN			REHABILITASI SOSIAL			PENEGAKAN HUKUM			PENDAMPINGAN PEMULANGAN/ REINTEGRASI		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																
2																
3																
4																
dst.																

Sumber Data : P2TP2A

9. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur

TABEL 5.9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN			KELOMPOK UMUR								
					< 18 TAHUN			18 – 25 TAHUN			> 25 TAHUN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data : P2TP2A

10. Anak Berkebutuhan Khusus

TABEL 5.10.1
JUMLAH ANAK BERKEBUHUTAN KHUSUS
MENURUT JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS															TOTAL		
		1			2			3			4			dst.					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1																			
2																			
3																			
4																			
dst.																			

Sumber Data: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan

Keterangan Jenis Disabilitas:
1. Tuna Netra
2. Tuna Rungu
3. Tuna Grahita
4. Tuna Daksa
5. Tuna Laras
6. Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan/atau bakat istimewa
7. Tuna Ganda
8. Autis
9. Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/ GPPH (Attention and hyperactivity Disorder/ ADHD)
10. Lamban Belajar
11. Kesulitan Belajar
12. Gangguan Komunikasi

9. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur

TABEL 5.9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN			KELOMPOK UMUR								
					< 18 TAHUN			18 – 25 TAHUN			> 25 TAHUN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1													
2													
3													
4													
dst													

Sumber Data : P2TP2A

10. Anak Berkebutuhan Khusus

TABEL 5.10.1
JUMLAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
MENURUT JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS																		TOTAL		
		1			2			3			4			dst.								
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH					
1																						
2																						
3																						
4																						
dst.																						

Sumber Data: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan

Keterangan Jenis Disabilitas:
1. Tuna Netra
2. Tuna Rungu
3. Tuna Grahita
4. Tuna Daksa
5. Tuna Laras
6. Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan/atau bakat istimewa
7. Tuna Ganda
8. Autis
9. Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/ GPPH (Attention and hyperactivity Disorder/ ADHD)
10. Lambat Belajar
11. Kesulitan Belajar
12. Gangguan Komunikasi

TABEL 5.10.2
JUMLAH SLB NEGERI DAN SWASTA TK, SD, SMP, SMU
DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ..

NO	KECAMATAN	SLB Negeri				JM	SLB Swasta				JM
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber Data: Dinas Pendidikan

TABEL 5.10.3
JUMLAH GURU NEGERI DAN SWASTA DI SLB
MENURUT JENJANGPENDIDIKAN
MENURUT JENISKELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ..

NO	KECAMATAN	Guru Negeri di SLB								JM	Guru Swastadi SLB								JM
		TK		SD		SMP		SMA			TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	
1																			
2																			
3																			
4																			
dst																			

Sumber Data : Dinas Pendidikan

11. Jumlah Anak Terlantar

TABEL 5.11
JUMLAH ANAK TERLANTAR MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR		
		L	P	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Dinas Sosial

TABEL 5.10.2

JUMLAH SLB NEGERI DAN SWASTA TK, SD, SMP, SMU

DI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ..

NO	KECAMATAN	SLB Negeri				JM	SLB Swasta				JM
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1											
2											
3											
4											
dst											

Sumber Data: Dinas Pendidikan

TABEL 5.10.3

JUMLAH GURU NEGERI DAN SWASTA DI SLB

MENURUT JENJANGPENDIDIKAN

MENURUT JENISKELAMIN

DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN ..

NO	KECAMATAN	Guru Negeri di SLB										JM	Guru Swastadi SLB										JM
		TK		SD		SMP		SMA					TK		SD		SMP		SMA				
		L	P	L	P	L	P	L	P				L	P	L	P	L	P	L	P			
1																							
2																							
3																							
4																							
dst																							

Sumber Data : Dinas Pendidikan

11. Jumlah Anak Terlantar

TABEL 5.11

JUMLAH ANAK TERLANTAR MENURUT JENIS KELAMIN

DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN....

NO	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR		
		L	P	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Dinas Sosial

12. Jumlah Anak Jalanan

TABEL 5.12
JUMLAH ANAK JALANAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO	KECAMATAN	ANAK JALANAN		
		L	P	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Dinas Sosial

C. DATA KELEMBAGAAN

I. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Kelembagaan PUG

TABEL 1.1
JUMLAH POKJA PUG, FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
(PKHP), FORUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN
(PPEP), FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, FORUM SIGA
DAN FOCAL POINT GENDER DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	POKJA PUG	PKHP	PPEP	FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	FORUM SIGA	FOCAL POINT GENDER
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data : DP3AP2KB

TABEL 1.1.1
DAFTAR KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER

NO	KECAMATAN	NAMA PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
dst			

Sumber Data : DP3AP2KB

12. Jumlah Anak Jalanan

TABEL 5.12
JUMLAH ANAK JALANAN MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN....

NO.	KECAMATAN	ANAK JALANAN		
		L	P	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : Dinas Sosial

C. DATA KELEMBAGAAN

1. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Kelembagaan PUG

TABEL 1.1
JUMLAH POKJA PUG, FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN
(PKHP), FORUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN
(PPEP), FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, FORUM SIGA
DAN FOCAL POINT GENDER DAN KECAMATAN DI KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	POKJA PUG	PKHP	PPEP	FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	FORUM SIGA	FOCAL POINT GENDER
1							
2							
3							
4							
dst							

Sumber Data : DP3AP2KB

TABEL 1.1.1
DAFTAR KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER

NO	KECAMATAN	NAMA PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
dst			

Sumber Data : DP3AP2KB

2. Kelembagaan PUG Bidang Kesehatan

TABEL 2.1
JUMLAH LAYANAN KESEHATAN YANG MELAYANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN KESEHATAN				
		RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	KLINIK	LAINNYA	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial

3. (Kecamatan Sayang IBU, RS Sayang IBU, Kelompok Suami Antar Jaga) dan Kader Bina Keluarga Balita

TABEL 1.3
JUMLAH POKJATAP GERAKAN SAYANG IBU (GSI), RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RS-SIB), KELOMPOK SUAMI SIAP, ANTAR, JAGA (SUAMI SIAGA)
DAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	SEKOLAH INKLUSIF			
		GSI	RS-SIB	SUAMI SIAGA	KADER BKB
1					
2					
3					
4					
dst.					

Sumber Data: Dinas Kesehatan

4. Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan (Pokjatap PBAP, Gugus Tugas PBAP, Kader BKB)

TABEL 1.4
JUMLAH POKJATAP PENURUNAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (PBAP), DAN GUGUS TUGAS PBAP DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PBAP	GUGUS TUGAS PBAP
1			
2			
3			
4			
dst			

Sumber Data: Dinas Pendidikan, DKPP dan DP3P2KB

2. Kelembagaan PUG Bidang Kesehatan

TABEL 2.1
JUMLAH LAYANAN KESEHATAN YANG MELAYANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN KESEHATAN				
		RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	KLINIK	LAINNYA	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
dst						

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial

3. (Kecamatan Sayang IBU, RS Sayang IBU, Kelompok Suami Antar Jaga) dan Kader Bina Keluarga Balita

TABEL 1.3
JUMLAH POKJATAP GERAKAN SAYANG IBU (GSI), RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RS-SIB), KELOMPOK SUAMI SIAP, ANTAR, JAGA (SUAMI SIAGA)
DAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO.	KECAMATAN	SEKOLAH INKLUSIF			
		GSI	RS-SIB	SUAMI SIAGA	KADER BKB
1					
2					
3					
4					
dst.					

Sumber Data: Dinas Kesehatan

4. Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan (Pokjatap PBAP, Gugus Tugas PBAP, Kader BKB)

TABEL 1.4
JUMLAH POKJATAP PENGURUSAN SUTA AKSARA PEREMPUAN (PBAP), DAN GUGUS TUGAS PBAP DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PBAP	GUGUS TUGAS PBAP
1			
2			
3			
4			
dst			

Sumber Data: Dinas Pendidikan, DKPP dan DP3PZKB

5. Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi (Desa Prima, P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi Perempuan, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keungan Mikro, Kelompok Tani/Nelayan Perempuan

TABEL 1.5.1
JUMLAH DESA "PRIMA" (PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI)
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1		
2		
3		
4		
dst		

Sumber Data : Dinas P3AP2KB, Disperindagkop dan DPMG

TABEL 1.5.2
PROGRAM P2WKSS, JUMLAH UMKM, KOPERASI, ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PEREMPUAN, BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM), KOPERASI PEREMPUAN, DAN KELOMPOK TANI/NELAYAN PEREMPUAN
DI KECAMATAN
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	P2WKSS	UMKM	KOPERASI	ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	KELOMPOK USAHA PEREMPUAN	KELOMPOK TANI PEREMPUAN	KELOMPOK NELAYAN PEREMPUAN
1									
2									
3									
4									
dst									

Sumber Data : DP3AP2KB, Disperindagkop dan DPMG

6. Kelembagaan Pelayanan Terpadu (P2TP2A)

TABEL 1.6
DAFTAR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	NAMA P2TP2A	ALAMAT	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : DP3AP2KB, P2TP2A

5. Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi (Desa Prima, PZWKSS, Organisasi UMKM, Koperasi Perempuan, Organisasi Peremp uan Pengusaha, Lembaga Keungan Mikro, Kelompok Tani/Nelayan Peremp uan

TABEL 1.5.1
JUMLAH DESA "PRIMA" (PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI)
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1		
2		
3		
4		
dst		

Sumber Data : Dinas P3AP2KB, Disperindagkop dan DPMG

TABEL 1.5.2
PROGRAM PZWKSS, JUMLAH UMKM, KOPERASI, ORGANISASI PEREMPUAN
PENGUSAHA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PEREMPUAN, BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM),
KOPERASI PEREMPUAN, DAN KELOMPOK TANI/NELAYAN PEREMPUAN
DI KECAMATAN
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	PZWKSS	UMKM	KOPERASI	ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	KELOMPOK USAHA PEREMPUAN	KELOMPOK NELAYAN PEREMPUAN
1								
2								
3								
4								
dst								

Sumber Data : DP3AP2KB, Disperindagkop dan DPMG

6. Kelembagaan Pelayanan Terpadu (PZTPZA)

TABEL 1.6
DAFTAR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	NAMA PZTPZA	ALAMAT	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
1				
2				
3				
4				
dst				

Sumber Data : DP3AP2KB PZTPZA

II. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

1. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak (Bina Keluarga Balita, Posyandu, Jumlah Panti Asuhan Anak)

TABEL 2.1
JUMLAH KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN KELANGSUNGAN HIDUP ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	BINA KELUARGA BALITA (BKB)	BINA KELUARGA REMAJA (BKR)	POSYANDU	PAUD	PANTI ASUHAN ANAK
1						
2						
3						
4						
dst.						

Sumber Data: DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan

2. Kelembagaan Partisipasi Anak (Forum Anak, Kegiatan Extra Kulikuler, Organisasi Anak)

TABEL 2.2
JUMLAH KELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	FORUM ANAK)	EXTRA KURIKULER	ORGANISASI ANAK	JUMLAH
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dispora, Disperindagkop

3. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas Traficking, Gugus Tugas KLA, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh)

TABEL 2.3
JUMLAH KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG LINGKUNGAN YANG KONDUSIF BAGI ANAK DI KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	GUGUS TUGAS TRAFICKING	GUGUS TUGAS KLA	LPA	LAINNYA
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : DP3AP2KB

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

II. Data Kelembagaan Pengawasan Hak Anak

1. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak (Bina Keluarga Balita, Posyandu, Jumlah Panti Asuhan Anak)

TABEL 2.1
JUMLAH KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN KELANGSUNGAN HIDUP ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	BINA KELUARGA BALITA (BKB)	BINA KELUARGA REMAJA (BKR)	POSY ANDU	PAUD	PANTI ASUHAN ANAK
1						
2						
3						
4						
dst.						

Sumber Data: DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan

2. Kelembagaan Partisipasi Anak (Forum Anak, Kegiatan Extra Kulikuler, Organisasi Anak)

TABEL 2.2
JUMLAH KELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK
DAN KECAMATAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	FORUM ANAK)	EXTRA KURIKULER	ORGANISA SI ANAK	JUMLAH
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data: Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Disporindagkop

3. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas Trafficking, Gugus Tugas KLA, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh)

TABEL 2.3
JUMLAH KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG LINGKUNGAN YANG KONDUSIF BAGI ANAK DI KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN .....

NO	KECAMATAN	GUGUS TUGAS TRAFFICKING	GUGUS TUGAS KLA	LPA	LAINNYA
1					
2					
3					
4					
dst					

Sumber Data : DP3AP2KB

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA